



PROVINSI SULAWESI SELATAN  
BUPATI PINRANG

PERATURAN BUPATI PINRANG  
NOMOR 48 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PINRANG NOMOR 44 TAHUN 2019  
TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA  
DAERAH KABUPATEN PINRANG  
TAHUN ANGGARAN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PINRANG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka Pelaksanaan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2019 serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
  - b. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2018 tentang APBN Tahun Anggaran 2019, Peraturan Presiden Nomor 129 Tahun 2018 tentang Rincian APBN Tahun Anggaran 2019 dan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 320/P/2019 tentang Satuan Pendidikan Penerima BOS Afirmasi dan BOS Kinerja Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 364/P/2019 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 320/P/2019 serta Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 31 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis BOS Afirmasi dan BOS Kinerja;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b dan dalam rangka Tertib Administrasi Pengelolaan Keuangan Daerah Tahun Anggaran 2019 perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pinrang Nomor 44 Tahun 2019 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pinrang Tahun Anggaran 2019;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
  2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
  7. Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pinrang;
  8. Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
  9. Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 13 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pinrang Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2018 Nomor 13), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 13 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pinrang Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2019 Nomor 3).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 44 TAHUN 2019 TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN PINRANG DAERAH TAHUN ANGGARAN 2019.

Pasal 1

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pinrang Tahun Anggaran 2019 terdiri atas :

1. Pendapatan		
a. Semula	Rp.	1.296.695.284.742,00
b. Bertambah	Rp.	4.936.000.000,00
<b>Jumlah Pendapatan Setelah Perubahan</b>	<b>Rp.</b>	<b>1.301.631.284.742,00</b>
2. Belanja		
1) Semula	Rp.	1.374.026.268.755,22
2) Bertambah	Rp.	4.936.000.000,00
<b>Jumlah Belanja Setelah Perubahan</b>	<b>Rp.</b>	<b>1.378.962.268.755,22</b>
<b>Defisit Setelah Perubahan</b>	<b>Rp.</b>	<b>(77.330.984.013,22)</b>

3. 1) Penerimaan Pembiayaan		
1) Semula	Rp.	77.330.984.013,22
2) Tidak Bertambah	Rp.	-
<b>Jumlah Penerimaan Pembiayaan</b>		
<b>Setelah Perubahan</b>	<b>Rp.</b>	<b>77.330.984.013,22</b>
2) Pengeluaran Pembiayaan		
1) Semula	Rp.	-
2) Tidak Bertambah	Rp.	-
<b>Jumlah Pengeluaran Pembiayaan</b>		
<b>Setelah Perubahan</b>	<b>Rp.</b>	<b>-</b>
<b>Jumlah Pembiayaan Neto</b>		
<b>Setelah Perubahan</b>	<b>Rp.</b>	<b>77.330.984.013,22</b>
<b>Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran</b>		
<b>Setelah Perubahan</b>	<b>Rp.</b>	<b>0,00</b>

Pasal 2

Ringkasan Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

Pelaksanaan Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang ditetapkan dalam Peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan.

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan Penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pinrang.

Ditetapkan di Pinrang  
pada tanggal 24 Oktober 2019

BUPATI PINRANG,



Diundangkan di Pinrang  
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PINRANG



BERITA DAERAH KABUPATEN PINRANG TAHUN 2019 NOMOR ...

**KABUPATEN PINRANG**  
**PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 44 TAHUN 2019**  
**TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN DAN PENDAPATAN BELANJA DAERAH KABUPATEN PINRANG**  
**TAHUN ANGGARAN 2019**

1.01 : PENDIDIKAN  
 1.01.01 : DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		Bertambah/ Berkurang	PENJELASAN	
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan			Rp
1	2	3	4	5 = 4 - 3	7	
1.01 01 16	BELANJA LANGSUNG PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR SEMBILAN TAHUN PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS) - JENJANG SD/MI/SDLB DAN SMP/MTS SERTA PESANTREN SALAFIYAH DAN SATUAN PENDIDIKAN NON-ISLAM SETARA SD DAN SMP	175.400.000,00 175.400.000,00 175.400.000,00	54.694.635.950,00 54.694.635.950,00 54.694.635.950,00	54.519.235.950,00 54.519.235.950,00 54.519.235.950,00	31,082,80 31,082,80 31,082,80	Lokasi : 12 Kecamatan Sumber Dana : DAK Non Fisik/DBH Kekurangan : Jumlah peserta pelatihan BOS, BOP BOS, BOP PAUD dan Dana Bantuan Operasional Bantuan Operasional sekolah sesuai analisis kebutuhan 1.000 570 sekolah/tembaga
1.01 01 16 63 5 2 1 01	BELANJA PEGAWAI Honorarium PNS	65.400.000,00 65.400.000,00	7.168.967.426,00 65.400.000,00	7.103.567.426,00 0,00	10,861,72 0,00	Honor Verifikasi Kabupaten/Dinas = (Orang x Rp.500.000,00) = = Rp.30.000.000,00
1.01 01 16 63 5 2 1 01 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	65.400.000,00	65.400.000,00	0,00	0,00	Honor Verifikasi Kabupaten/Dinas = 60 OB (Orang x Rp.500.000,00) = = Rp.30.000.000,00
1.01 01 16 63 5 2 1 04	Honorarium Pengelolaan Dana BOS		7.103.567.426,00	7.103.567.426,00	100,00	Penanggung Jawab BOS SD/SMP = 12 Orang/ Bul x Rp.500.000,00 = = Rp.6.000.000,00 Manager BOS = 12 Orang/ Bul x Rp.450.000,00 = = Rp.5.400.000,00 Staf Pengelola = 60 Orang/ Bul x Rp.400.000,00 = = Rp.24.000.000,00 Honor Pengelolaan Dana BOS



1		2		3	4	5 = 4 - 3	6	7
1.01	01	16	63	5	2	2	22	Honor Pemateri/Moderator = Rp.25.485.950,00
1.01	01	16	63	5	2	2	22	- SD = 1 Ls x Rp.18.910.929.455,00 = = Rp.18.910.929.455,00
1.01	01	16	63	5	2	2	22	- SMP = 1 Ls x Rp.10.191.888.617,00 = = Rp.10.191.888.617,00
1.01	01	16	63	5	2	3	31	- SD = 1 Ls x Rp.9.085.440.202,00 = = Rp.9.085.440.202,00
1.01	01	16	63	5	2	3	31	- SMP = 1 Ls x Rp.4.105.173.300,00 = = Rp.4.105.173.300,00
1.01	01	16	63	5	2	3	31	- BIOS KNERJA
								SDN 285 PINRANG = 1 Ls x Rp.81.000.000,00 = = Rp.81.000.000,00
								SDN 46 DUAMPANUA = 1 Ls x Rp.115.000.000,00 = = Rp.115.000.000,00
								SDN 52 LANGKA = 1 Ls x Rp.87.000.000,00 = = Rp.87.000.000,00
								SDN 114 PATAMPANUA = 1 Ls x Rp.71.000.000,00 = = Rp.71.000.000,00
								SDN 108 SUPPA = 1 Ls x Rp.48.000.000,00 = = Rp.48.000.000,00
								SDN 206 PALLAMEANG = 1 Ls x Rp.87.000.000,00 = = Rp.87.000.000,00
								SDN 152 LEMBAANG = 1 Ls x Rp.65.000.000,00 = = Rp.65.000.000,00
								SDN 224 DUAMPANUA = 1 Ls x Rp.47.000.000,00 = = Rp.47.000.000,00
								SD IMPRES BARIUPPU = 1 Ls x Rp.59.000.000,00 = = Rp.59.000.000,00
								SD PELITA PINRANG = 1 Ls x Rp.71.000.000,00 = = Rp.71.000.000,00
								SMPN 2 LEMBAANG = 1 Ls x Rp.241.000.000,00 = = Rp.241.000.000,00
								SMPN 8 PINRANG = 1 Ls x Rp.181.000.000,00 = = Rp.181.000.000,00
								- BOS AFIRMASI
								SDN 121 PATAMPANUA = 1 Ls x Rp.76.000.000,00 = = Rp.76.000.000,00
								SDN 300 LEMBAANG = 1 Ls x Rp.56.000.000,00 = = Rp.56.000.000,00
								SDN 295 PINRANG = 1 Ls x Rp.54.000.000,00 = = Rp.54.000.000,00
								SDN 294 PINRANG = 1 Ls x Rp.76.000.000,00 = = Rp.76.000.000,00
								SDN 299 PINRANG = 1 Ls x Rp.56.000.000,00 = = Rp.56.000.000,00
								SDN 42 PINRANG = 1 Ls x Rp.70.000.000,00 = = Rp.70.000.000,00
								SDN 41 PINRANG = 1 Ls x Rp.68.000.000,00 = = Rp.68.000.000,00
								SDN 34 PINRANG = 1 Ls x Rp.84.000.000,00 = = Rp.84.000.000,00

1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
						SDN 35 MAINGKI = 1 Ls x Rp.66.000.000,00 = = Rp.66.000.000,00
						SDN 36 DUAMPANUA = 1 Ls x Rp.72.000.000,00 = = Rp.72.000.000,00
						SDN 37 ANGAJANG = 1 Ls x Rp.60.000.000,00 = = Rp.60.000.000,00
						SDN 38 DUAMPANUA = 1 Ls x Rp.48.000.000,00 = = Rp.48.000.000,00
						SDN 272 LEMBAANG = 1 Ls x Rp.86.000.000,00 = = Rp.86.000.000,00
						SDN 274 PINRANG = 1 Ls x Rp.60.000.000,00 = = Rp.60.000.000,00
						SDN 278 PINRANG = 1 Ls x Rp.62.000.000,00 = = Rp.62.000.000,00
						SDN 279 PINRANG = 1 Ls x Rp.86.000.000,00 = = Rp.86.000.000,00
						SDN 270 LEMBAANG = 1 Ls x Rp.54.000.000,00 = = Rp.54.000.000,00
						SDN 260 PINRANG = 1 Ls x Rp.62.000.000,00 = = Rp.62.000.000,00
						SDN 265 PINRANG = 1 Ls x Rp.88.000.000,00 = = Rp.88.000.000,00
						SDN 73 PINRANG = 1 Ls x Rp.46.000.000,00 = = Rp.46.000.000,00
						SDN 86 PINRANG = 1 Ls x Rp.42.000.000,00 = = Rp.42.000.000,00
						SDN INPRES PADANG LOANG = 1 Ls x Rp.56.000.000,00 = = Rp.56.000.000,00
						SDN 110 SUPPA = 1 Ls x Rp.50.000.000,00 = = Rp.50.000.000,00
						SDN 111 SUPPA = 1 Ls x Rp.32.000.000,00 = = Rp.32.000.000,00
						SDN 113 PATAMPANUA = 1 Ls x Rp.78.000.000,00 = = Rp.78.000.000,00
						SDN 103 SUPPA = 1 Ls x Rp.54.000.000,00 = = Rp.54.000.000,00
						SDN 104 SUPPA = 1 Ls x Rp.34.000.000,00 = = Rp.34.000.000,00
						SDN 195 PATAMPANUA = 1 Ls x Rp.50.000.000,00 = = Rp.50.000.000,00
						SDN 196 DUAMPANUA = 1 Ls x Rp.44.000.000,00 = = Rp.44.000.000,00
						SDN 198 PINRANG = 1 Ls x Rp.60.000.000,00 = = Rp.60.000.000,00
						SDN 191 PINRANG = 1 Ls x Rp.62.000.000,00 = = Rp.62.000.000,00
						SDN 186 LEMBAANG = 1 Ls x Rp.80.000.000,00 = = Rp.80.000.000,00
						SDN 202 SUPPA = 1 Ls x Rp.52.000.000,00 = = Rp.52.000.000,00
						SDN 219 PINRANG = 1 Ls x Rp.66.000.000,00 = = Rp.66.000.000,00
						SDN 221 PINRANG = 1 Ls x Rp.50.000.000,00 = = Rp.50.000.000,00
						SDN 211 PINRANG = 1 Ls x Rp.70.000.000,00 = = Rp.70.000.000,00
						SDN 140 DUAMPANUA = 1 Ls x Rp.80.000.000,00 = = Rp.80.000.000,00
						SDN 148 LEMBAANG = 1 Ls x Rp.86.000.000,00 = = Rp.86.000.000,00

1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
						SDN 149 LEMBAANG = 1 Ls x Rp.76.000.000,00 = = Rp.76.000.000,00
						SDN 122 PATAMPANJUA = 1 Ls x Rp.80.000.000,00 = = Rp.80.000.000,00
						SDN 123 PATAMPANJUA = 1 Ls x Rp.68.000.000,00 = = Rp.68.000.000,00
						SD INPRES SAJ SALU = 1 Ls x Rp.44.000.000,00 = = Rp.44.000.000,00
						SDN 146 LEMBAANG = 1 Ls x Rp.76.000.000,00 = = Rp.76.000.000,00
						SDN 268 LEMBAANG = 1 Ls x Rp.70.000.000,00 = = Rp.70.000.000,00
						SDN 147 LEMBAANG = 1 Ls x Rp.86.000.000,00 = = Rp.86.000.000,00
						SDN 117 PATAMPANJUA = 1 Ls x Rp.58.000.000,00 = = Rp.58.000.000,00
						SDN 311 DUAMPANJUA = 1 Ls x Rp.54.000.000,00 = = Rp.54.000.000,00
						SDN 43 BANGKOKO = 1 Ls x Rp.38.000.000,00 = = Rp.38.000.000,00
						SDN 261 DUAMPANJUA = 1 Ls x Rp.60.000.000,00 = = Rp.60.000.000,00
						SDN 276 PINTUANG = 1 Ls x Rp.28.000.000,00 = = Rp.28.000.000,00
						SMPN 4 LEMBAANG = 1 Ls x Rp.150.000.000,00 = = Rp.150.000.000,00
						SMPN 2 SUPPA = 1 Ls x Rp.204.000.000,00 = = Rp.204.000.000,00
						SMPN 3 CEMPA = 1 Ls x Rp.124.000.000,00 = = Rp.124.000.000,00
						SMPN 4 MATTERO BULU SATAP = 1 Ls x Rp.54.000.000,00 = = Rp.54.000.000,00
						SMPN 9 LEMBAANG = 1 Ls x Rp.92.000.000,00 = = Rp.92.000.000,00
						SMPN 3 BATULAPPA SATAP = 1 Ls x Rp.42.000.000,00 = = Rp.42.000.000,00
	Jumlah Belanja	175,400,000.00	54,694,635,950.00	54,519,235,950.00	31,882.00	
	Surplus/(Defisit)	(175,400,000.00)	(54,694,635,950.00)	(54,519,235,950.00)	31,882.00	

1.20 : OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADM. KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN & PERSANDIAAN  
 1.20.05 : PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		Bertambah/Berkurang		PENJELASAN
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Rp.	%	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
	<b>PENDAPATAN</b>					
1.20 05 00 00 4 1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	16.724.012.492,00	16.724.012.492,00	0,00	0,00	
1.20 05 00 00 4 1 3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	11.224.012.492,00	11.224.012.492,00	0,00	0,00	
1.20 05 00 00 4 1 3 01	Bagian Laba Atas Penyetaraan Modal pada Perusahaan Milik Daerah / BUMD	11.224.012.492,00	11.224.012.492,00	0,00	0,00	
1.20 05 00 00 4 1 3 01 02	BUMD .....	11.224.012.492,00	11.224.012.492,00	0,00	0,00	
1.20 05 00 00 4 1 4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	5.500.000.000,00	5.500.000.000,00	0,00	0,00	
1.20 05 00 00 4 1 4 02	Penerimaan Jasa Giro	4.500.000.000,00	4.500.000.000,00	0,00	0,00	
1.20 05 00 00 4 1 4 02 01	Jasa Giro Kas Daerah	4.500.000.000,00	4.500.000.000,00	0,00	0,00	
1.20 05 00 00 4 1 4 03	Pendapatan Bunga Deposito	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	0,00	0,00	
1.20 05 00 00 4 1 4 03 01	Rekening Deposito pada Bank	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	0,00	0,00	
1.20 05 00 00 4 2	DANA PERIMBANGAN	986.438.878.000,00	986.037.275.450,00	(401.602.550,00)	(0,04)	
1.20 05 00 00 4 2 1	Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	18.500.307.000,00	18.500.307.000,00	0,00	0,00	
1.20 05 00 00 4 2 1 01	Bagi Hasil Pajak	11.181.856.000,00	11.181.856.000,00	0,00	0,00	
1.20 05 00 00 4 2 1 01 01	Bagi Hasil dari Pajak Bumi dan Bangunan	5.725.891.000,00	5.725.891.000,00	0,00	0,00	
1.20 05 00 00 4 2 1 01 04	Bagi Hasil dari Pajak Penghasilan (PPh) WPOPDN dan PPh Pasal 21	5.455.965.000,00	5.455.965.000,00	0,00	0,00	
1.20 05 00 00 4 2 1 02	Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam	7.318.451.000,00	7.318.451.000,00	0,00	0,00	
1.20 05 00 00 4 2 1 02 13	Bagi Hasil Sumber Daya Alam Perikanan	983.593.000,00	983.593.000,00	0,00	0,00	
1.20 05 00 00 4 2 1 02 14	Bagi Hasil Sumber Daya Alam Pertambangan Minyak Bumi dan Gas Bumi	2.737.840.000,00	2.737.840.000,00	0,00	0,00	



1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
1.20 05 00 00 4 2 3 02	Dana Alokasi Khusus Non Fisik	136.863.519.000,00	136.863.519.000,00	0,00	0,00	Pasar = Rp.6.397.366.000,00 Sanitasi = Rp.3.749.529.000,00 Air Minum = Rp.540.000.000,00 - Pengendalian Penyakit = Rp.2.760.592.000,00 - Penunanan Stunting = Rp.524.975.000,00
1.20 05 00 00 4 2 3 02 01	Tunjangan Profesi Guru	101.749.318.000,00	101.749.318.000,00	0,00	0,00	- Tunjangan Profesi Guru = Rp.101.749.318.000,00
1.20 05 00 00 4 2 3 02 02	Tambahan Penghasilan Guru	1.143.000.000,00	1.143.000.000,00	0,00	0,00	- Tambahan Penghasilan Guru = Rp.1.143.000.000,00
1.20 05 00 00 4 2 3 02 04	Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini	4.573.200.000,00	4.573.200.000,00	0,00	0,00	- BOP PAUD = Rp.4.573.200.000,00
1.20 05 00 00 4 2 3 02 05	Bantuan Operasional Kesehatan	15.138.050.000,00	15.138.050.000,00	0,00	0,00	Bantuan Operasional Kesehatan dan KB : = Rp.0,00 - BOK Kesehatan = Rp.15.138.050.000,00
1.20 05 00 00 4 2 3 02 06	Akreditasi Rumah Sakit	1.789.600.000,00	1.789.600.000,00	0,00	0,00	Akreditasi : = Rp.0,00 - Akreditasi Rumah Sakit = Rp.550.000.000,00 - Akreditasi Puskesmas = Rp.1.239.600.000,00
1.20 05 00 00 4 2 3 02 08	Jaminan Persalinan	2.398.000.000,00	2.398.000.000,00	0,00	0,00	- Jaminan Persalinan = Rp.2.398.000.000,00
1.20 05 00 00 4 2 3 02 12	Tunjangan Khusus Guru	2.337.249.000,00	2.337.249.000,00	0,00	0,00	- Tunjangan Khusus Guru = Rp.2.337.249.000,00
1.20 05 00 00 4 2 3 02 13	Bantuan Operasional Kesehatan dan Bantuan Operasional Keluarga Berencana	3.073.887.000,00	3.073.887.000,00	0,00	0,00	BO Keluarga Berencana = Rp.3.073.887.000,00
1.20 05 00 00 4 2 3 02 14	Dana Pelayanan Administrasi Kependudukan	1.393.679.000,00	1.393.679.000,00	0,00	0,00	- Dana Pelayanan Administrasi Kependudukan = Rp.1.393.679.000,00
1.20 05 00 00 4 2 3 02 15	Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan	2.745.800.000,00	2.745.800.000,00	0,00	0,00	BOP Pendidikan Kesetaraan = Rp.2.745.800.000,00
1.20 05 00 00 4 2 3 02 16	Dana Pelayanan Kepariwisata	521.736.000,00	521.736.000,00	0,00	0,00	Pelayanan Kepariwisata = Rp.521.736.000,00
1.20 05 00 00 4 3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	180.414.360.800,00	184.310.960.800,00	3.896.600.000,00	(0,58)	

1			2		3		4		5 = 4 - 3		6		7	
1.20	05	00	00	4	3	1								
Pendapatan Hibah														
1.20	05	00	00	4	3	1	01							
Pendapatan Hibah dari Pemerintah														
1.20	05	00	00	4	3	1	01	53.972.427.000,00	57.869.027.000,00	3.896.600.000,00	(1,93)			
Pemerintah														
1.20	05	00	00	4	3	1	01	53.972.427.000,00	52.933.027.000,00	(1.039.400.000,00)	(1,93)			
1.20	05	00	00	4	3	1	06							
Pendapatan Hibah Dana BOS														
1.20	05	00	00	4	3	1	06		4.936.000.000,00	4.936.000.000,00				
Pendapatan Hibah Dana BOS														
1.20	05	00	00	4	3	3	01							
Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan														
Pemerintah Daerah lainnya														
1.20	05	00	00	4	3	3	01	53.375.500.000,00	53.375.500.000,00	0,00	0,00			
Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi														
1.20	05	00	00	4	3	3	01	11.700.000.000,00	11.700.000.000,00	0,00	0,00			
Bagi Hasil dari Pajak Kendaraan Bermotor														
1.20	05	00	00	4	3	3	01	10.525.000.000,00	10.525.000.000,00	0,00	0,00			
Bagi Hasil dari Bea Balik Nama Kendaraan														
Bermotor														
1.20	05	00	00	4	3	3	01	13.400.500.000,00	13.400.500.000,00	0,00	0,00			
Bagi Hasil dari Pajak Bahan Bakar Kendaraan														
Bermotor														
1.20	05	00	00	4	3	3	01	2.500.000.000,00	2.500.000.000,00	0,00	0,00			
Bagi Hasil dari Pajak Pengambilan dan														
Pemanfaatan Air Permukaan														
1.20	05	00	00	4	3	3	01	15.250.000.000,00	15.250.000.000,00	0,00	0,00			
Bagi Hasil dari Pajak Rokok														
1.20	05	00	00	4	3	5	01	5.545.260.800,00	5.545.260.800,00	0,00	0,00			
Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah														
Daerah lainnya														
1.20	05	00	00	4	3	5	01	5.545.260.800,00	5.545.260.800,00	0,00	0,00			
Bantuan Keuangan dari Provinsi														
1.20	05	00	00	4	3	5	01	5.545.260.800,00	5.545.260.800,00	0,00	0,00			
Bantuan Keuangan dari Provinsi														
1.20	05	00	00	4	3	6	06	67.521.173.000,00	67.521.173.000,00	0,00	0,00			
Dana Transfer Lainnya														
1.20	05	00	00	4	3	6	06	67.521.173.000,00	67.521.173.000,00	0,00	0,00			
Dana Desa														
1.20	05	00	00	4	3	6	06	67.521.173.000,00	67.521.173.000,00	0,00	0,00			
Dana Desa														

1.20.05 : PELABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH

1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
	Jumlah Pendapatan	1.183.577.251.292,00	1.187.072.248.742,00	3.494.997.450,00	0,30	- Dana Desa = Rp.67.521.173.000,00 - Dana Desa = Rp.67.521.173.000,00

